

## Peranan Dinas Koperasi UMKM Membantu Usaha Mikro Dalam Membuat Hak Merek

Gusti Prayoga<sup>1</sup>, Fadilla<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>. Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri  
Email: gustiprayoga@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu usaha mikro dalam proses pembuatan hak merek. Hak merek merupakan elemen penting dalam perlindungan usaha mikro, karena memberikan kejelasan hukum, meningkatkan daya saing, dan melindungi produk dari tindakan plagiarisme. Dinas Koperasi dan UKM memainkan peran strategis dalam mendampingi pelaku usaha mikro melalui pelatihan, penyuluhan, dan fasilitasi administrasi pendaftaran hak merek sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dengan pegawai dinas, dan dokumentasi terkait proses pendaftaran merek dagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM aktif memberikan edukasi tentang pentingnya hak merek, membantu menyusun dokumen pendaftaran, dan mendampingi pelaku usaha selama proses verifikasi hingga diterbitkannya hak merek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Dinas Koperasi dan UKM sangat signifikan dalam mendukung usaha mikro untuk mendapatkan hak merek, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

**Kata kunci:** *Dinas Koperasi, Hak Merek, Usaha Mikro, Pendampingan.*

### Abstract

*This study aims to analyze the role of the Cooperatives and SMEs Office of South Sumatra Province in assisting micro-enterprises in the process of creating trademark rights. Trademark rights are an important element in protecting micro-enterprises, because they provide legal clarity, increase competitiveness, and protect products from plagiarism. The Cooperatives and SMEs Office plays a strategic role in assisting micro-enterprises through training, counseling, and facilitating the administration of trademark registration in accordance with applicable regulations. The methods used in this study were observation, interviews with department employees, and documentation related to the trademark registration process. The results of the study showed that the Cooperatives and SMEs Office actively provided education about the importance of trademark rights, helped prepare registration documents, and assisted business actors during the verification process until the issuance of trademark rights. This study concludes that the role of the Cooperatives and*

*SMEs Office is very significant in supporting micro-enterprises to obtain trademark rights, which in turn can increase competitiveness and business sustainability.*

**Keywords:** *Cooperatives Office, Trademark Rights, Micro-Enterprises, Assistance.*

## **Pendahuluan**

Dengan adanya Koperasi dan UKM mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah dalam mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha, keterampilan pengelolaan usaha sekaligus mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan dikarenakan berhasil menyumbangkan 57% dari PDB (di dukung oleh data BPS tahun 2006 - 2010) dimana UMKM meningkat bukan hanya dari segi kuantitas melainkan tenaga kerja, modal serta asset mereka (Mapaza, et.al, 2022). Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berperan aktif dalam membantu pelaku usaha mikro menghadapi tantangan ini melalui pendampingan dalam pembuatan hak merek. Peran tersebut mencakup edukasi, pelatihan, dan pendampingan administratif, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memahami prosedur pendaftaran hak merek dan memanfaatkan hak tersebut untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka (Abdi, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam membantu usaha mikro di Sumatera Selatan, khususnya dalam proses pembuatan hak merek. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kontribusi dinas dalam mendukung pengembangan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara rinci peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam membantu usaha mikro membuat hak merek. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: observasi langsung terhadap kegiatan operasional dinas, wawancara mendalam dengan pegawai dinas dan pelaku usaha mikro yang terlibat dalam proses pendaftaran hak merek, serta studi dokumentasi yang mencakup analisis

kebijakan dan prosedur terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pendampingan yang dilakukan oleh dinas, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan daya saing usaha mikro di Sumatera Selatan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Proses Pembuatan Hak Merek

Proses pembuatan hak merek (pendaftaran merek) di Indonesia dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Pencarian Merek (Trademark Search) Sebelum mengajukan pendaftaran, sebaiknya lakukan pencarian untuk memastikan bahwa merek yang akan didaftarkan belum ada yang terdaftar atau digunakan oleh pihak lain. Ini dapat dilakukan di situs web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau melalui jasa konsultan hukum yang berpengalaman.
2. Persiapan Dokumen Untuk mengajukan pendaftaran merek, Anda harus menyiapkan beberapa dokumen, antara lain:
  - a. Nama dan Alamat usaha
  - b. Logo, Nama atau gambar yang akan didaftarkan sebagai merek
  - c. Klasifikasi barang atau jasa yang akan dilindungi dengan merek tersebut sesuai dengan sistem klasifikasi internasional (Nice Classification)
3. Pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)  
Pendaftaran merek dilakukan melalui DJKI, baik secara online melalui sistem e-filing atau secara manual. Pemohon akan mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang diperlukan.

4. Pemeriksaan Formalitas Setelah pengajuan, DJKI akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa dokumen yang diserahkan lengkap dan sesuai dengan persyaratan.
5. Pemeriksaan Substansi Setelah pemeriksaan formalitas, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti tidak ada kesamaan yang membingungkan dengan merek yang sudah terdaftar, tidak bersifat deskriptif, dan tidak melanggar norma kesusilaan.
6. Penyampaian Hasil Pemeriksaan jika tidak ada masalah dalam pemeriksaan substansi, DJKI akan mempublikasikan merek yang diajukan dalam Berita Resmi Merek untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan (opposisi) dalam waktu 2 bulan setelah publikasi.
7. Pemberian Sertifikat Merek Jika tidak ada keberatan dalam periode publikasi dan semua pemeriksaan telah dilalui dengan sukses, DJKI akan mengeluarkan sertifikat pendaftaran merek. Sertifikat ini menyatakan bahwa merek tersebut telah terdaftar dan dilindungi oleh hukum di Indonesia.

Setelah merek terdaftar, pemilik merek dapat melindungi mereknya dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain.

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memainkan peran penting dalam membantu usaha mikro dalam proses pembuatan hak merek. Peran tersebut diwujudkan melalui program pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan kepada pelaku usaha mikro. Beberapa temuan utama dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pendampingan Administratif Dinas Koperasi menyediakan layanan pendampingan administratif yang meliputi pengumpulan dokumen, bimbingan teknis terkait pengisian formulir pendaftaran merek, dan fasilitasi proses pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendampingan ini sangat membantu pelaku usaha mikro yang belum memahami prosedur pendaftaran merek secara mendalam.

2. Edukasi dan Pelatihan Edukasi yang diberikan mencakup pemahaman tentang pentingnya hak merek dalam melindungi produk dari plagiarisme dan meningkatkan nilai komersial. Selain itu, pelatihan seperti digital marketing turut diselenggarakan untuk memaksimalkan potensi merek dalam meningkatkan daya saing usaha mikro di pasar lokal maupun nasional.

### 3. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala ditemukan dalam pelaksanaan program ini, baik dari sisi dinas maupun pelaku usaha.

- a. Kendala Internal: Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di Dinas Koperasi menghambat pelaksanaan program secara menyeluruh.
- b. Kendala Eksternal: Minimnya kesadaran pelaku usaha mikro terhadap pentingnya hak merek serta rendahnya literasi hukum menjadi tantangan utama.
- c. Proses Administrasi yang Panjang: Proses verifikasi dan persetujuan dari DJKI seringkali memakan waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha mikro untuk segera memanfaatkan hak merek.

Pendampingan Dinas Koperasi dan UKM merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaku usaha mikro menghadapi tantangan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Hak merek tidak hanya melindungi produk dari pelanggaran, tetapi juga menjadi aset berharga yang meningkatkan kredibilitas usaha (Prasetiasari, et.al, 2023). Namun, untuk meningkatkan efektivitas program ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti penguatan kapasitas dinas melalui pelatihan bagi pegawai, alokasi anggaran yang memadai, serta penyelenggaraan program edukasi berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, digitalisasi proses pendaftaran merek dapat menjadi solusi untuk mengatasi

hambatan administratif. Dengan memanfaatkan teknologi, dinas dapat mempercepat pengumpulan dokumen dan memonitor proses pendaftaran secara transparan. Hal ini akan memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha mikro yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Secara keseluruhan, peran Dinas Koperasi dan UKM sangat krusial dalam membangun ekosistem usaha mikro yang lebih terorganisir dan kompetitif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan

### **Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaku usaha mikro melalui program pendampingan administratif, edukasi, dan pelatihan. Pendampingan administratif yang diberikan memudahkan pelaku usaha mikro dalam mengurus pendaftaran hak merek, sementara pelatihan dan edukasi meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya perlindungan merek sebagai aset usaha. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik dari segi keterbatasan sumber daya di dinas maupun kurangnya kesadaran dan literasi hukum di kalangan pelaku usaha mikro. Namun, dampak positif yang dihasilkan dari program ini sangat signifikan, antara lain meningkatnya kesadaran pelaku usaha mikro akan pentingnya perlindungan merek, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha mereka. Untuk meningkatkan efektivitas program ini, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM Dinas Koperasi, alokasi anggaran yang memadai, serta penguatan literasi hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam proses pendaftaran merek dapat mempercepat prosedur administrasi dan mempermudah akses bagi pelaku usaha yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Secara keseluruhan, peran Dinas Koperasi dan UKM sangat krusial dalam menciptakan ekosistem usaha mikro yang lebih terorganisir dan kompetitif, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Abdi, R. M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Mapaza, G., Faizal, M., & Aravik, H. (2022). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Batu Cabang Kayu Agung Terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tanjung Batu Pada Masa Pandemi Covid-19. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 20-29.
- Merek. (n.d.). [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andriani, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Roji, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap merek terdaftar dalam mengatasi pelanggaran merek atas transaksi elektronik perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Notarius*, 2(2), 309-319. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17051>
- Septian. (2024, July 19). *Pahami Syarat dan Proses Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia*. Kontrak Hukum. <https://kontrakhukum.com/article/pahami-syarat-dan-proses-pendaftaran-merek-dagang-di-indonesia/>

**Gusti Prayoga, Fadilla**

Peranan Dinas Koperasi UMKM Membantu Usaha Mikro Dalam Membuat Hak Merek